

**LEMBAR KERJA EVALUASI DINAS KESEHATAN TAHUN 2021**

Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan
36.30				25.29		
14.60				11.54		
2.00				2.00		
0.40				0.40		
	a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja	A/B/C	A	1.00		Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi / Penanggungjawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi dibuktikan dengan adanya : (1) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Nomor 800/DISKES-SKRT/30 tanggal 1 Februari 2021. tentang Tim Reformasi Birokrasi Internal Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021. (2) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Nomor 800/DISKES-SKRT/106 tanggal 11 April 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Internal Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2022.
	a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja	A/B/C/D	A	1.00		Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi /Penanggungjawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Nomor 800/DISKES-SKRT/31 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021.
	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	A	1.00		Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti yang dibuktikan dengan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja yang telah ditindaklanjuti.
0.40				0.40		
	Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Ya/Tidak	Ya	1.00		Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan sesuai dengan : (1) Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 9 tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkulu. (2) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Nomor 800/DISKES-SKRT/ 31 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021. (3) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Nomor 800/DISKES-SKRT/ 08 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2022.
	a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1.00		Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dibuktikan dengan : (1) Undanguan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 060/ORG/2021/388 tanggal 24 November 2021 Perihal Asistensi Penguatan PMPRB. (2) Undanguan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Nomor 800/DISKES-SKRT/787 tanggal 20 Mei 2022 Perihal Asistensi Penguatan PMPRB di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu.
	a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab	A/B/C	A	1.00		Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan RoadMap sesuai dengan : (1) Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 9 tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkulu. (2) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Nomor 800/DISKES-SKRT/31 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021. (3) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Nomor 800/DISKES-SKRT/ 08 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2022.
0.80				0.80		
	a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB	A/B/C/D	A	1.00		Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB sesuai dengan : (1) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Nomor 800/DISKES-SKRT/42 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Asesor Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu. (2) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Nomor 800/DISKES-SKRT/106 tanggal 11 April 2022 Tentang Penetapan Tim Asesor Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu.
	a. Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator asesor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas c. Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas	A/B/C	A	1.00		Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas hal ini ditunjukkan dengan adanya Berita Acara Penilaian Asesor unit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu terhadap penilaian LKEPMPRB Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
	a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A/B/C	A	1.00		Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan dengan adanya Nota Dinas Penyampaian RATL Pemenuhan RB Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu.

	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	A	1.00	Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan adanya: (1) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Nomor 800/DISKES-SKRT/31 Tanggal 1 Februari 2021 Tentang Penetapan Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021. (2) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Nomor 800/DISKES-SKRT/ 08 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.
0.40				0.40	
	a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1.00	Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibuktikan dengan adanya : (1) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Nomor 800/DISKES-SKRT/31 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021. (2) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Nomor 800/DISKES-SKRT/ 08 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.
	a. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja b. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja c. Sudah terdapat upaya pembentukan <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i>	A/B/C/D	A	1.00	Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dengan dilampirkan Dashboard Kasus Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
1.00				0.50	
1.00				0.50	
	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	C	0.00	Belum dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
	a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak harmonis/tidak sinkron/ bersifat menghambat	A/B/C	A	1.00	Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas,Fungsi serta tahun kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
2.00				1.50	
1.00				0.50	
	a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi	A/B/C	B	0.50	Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran organisasi sesuai dengan : (1) Surat dari Kemendagri No 130/1970/OTDA Tanggal 26 Maret 2021 Tentang penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Adimistrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. (2) Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Nomor 060/ORG.1/3487 tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Kedudukan, SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
	a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	A/B/C	B	0.50	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi sesuai dengan : (1) Surat dari Kemendagri No 130/1970/OTDA Tanggal 26 Maret 2021 Tentang penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Adimistrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. (2) Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Nomor 060/ORG.1/3487 tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Kedudukan, SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	A/B/C	B	0.50	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi fungsi sesuai dengan : (1) Surat dari Kemendagri No 130/1970/OTDA Tanggal 26 Maret 2021 Tentang penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Adimistrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. (2) Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Nomor 060/ORG.1/3487 tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Kedudukan, SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	A/B/C	B	0.50	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan sesuai dengan : (1) Surat dari Kemendagri No 130/1970/OTDA Tanggal 26 Maret 2021 Tentang penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Adimistrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. (2) Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Nomor 060/ORG.1/3487 tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Kedudukan, SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

	a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja	A/B/C	B	0.50	<p>Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja sesuai dengan :</p> <p>(1) Surat dari Kemendagri No 130/1970/OTDA Tanggal 26 Maret 2021 Tentang penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Adimistrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.</p> <p>(2) Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Nomor 060/ORG.1/3487 tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Kedudukan, SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.</p> <p>(3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.</p> <p>(4) Kecocokan dokumen RPJMD Tabel 5.1 dan RENSTRA Tabel 4.1</p>
	a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya	A/B/C	B	0.50	<p>Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya sesuai dengan :</p> <p>(1) Surat dari Kemendagri No 130/1970/OTDA Tanggal 26 Maret 2021 Tentang penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Adimistrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.</p> <p>(2) Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Nomor 060/ORG.1/3487 tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Kedudukan, SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.</p> <p>(3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis</p>
	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	A/B/C	B	0.50	<p>Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan sesuai dengan :</p> <p>(1) Surat dari Kemendagri No 130/1970/OTDA Tanggal 26 Maret 2021 Tentang penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Adimistrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.</p> <p>(2) Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Nomor 060/ORG.1/3487 tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Kedudukan, SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.</p> <p>(3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis</p> <p>(4) Kecocokan dokumen RPJMD Tabel 5.1 dan RENSTRA Tabel 4.1</p>
	a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan mandat c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	A/B/C	B	0.50	<p>Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan mandat sesuai dengan :</p> <p>(1) Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Nomor 060/ORG.1/3487 tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Kedudukan, SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.</p> <p>(2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis</p>
	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi	A/B/C	B	0.50	<p>Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi sesuai dengan :</p> <p>(1) Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Nomor 060/ORG.1/3487 tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Kedudukan, SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.</p> <p>(2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis</p>
	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	A/B/C	B	0.50	<p>Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis sesuai dengan :</p> <p>(1) Surat dari Kemendagri No 130/1970/OTDA Tanggal 26 Maret 2021 Tentang penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Adimistrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.</p> <p>(2) Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Nomor 060/ORG.1/3487 tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Kedudukan, SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.</p> <p>(3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis</p>
1.00				1.00	
	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1.00	<p>Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi sesuai dengan :</p> <p>(1) Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Nomor 060/ORG.1/3487 tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Kedudukan, SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.</p> <p>(2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis</p>
	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1.00	<p>Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi sesuai dengan :</p> <p>(1) Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Nomor 060/ORG.1/3487 tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Kedudukan, SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.</p> <p>(2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis</p>
1.00				0.81	
0.50				0.44	

	a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	A/B/C	A	1.00	Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang tertuang di dalam Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
	a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C	A	1.00	Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan : (1) Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 115 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu. (2) Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu.
	a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	A/B/C	A	1.00	Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi ditunjukkan dengan adanya : (1) Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 dan (2) Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2021-2026 (3) Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
	a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja	A/B/C/D	A	1.00	Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja dibuktikan adanya : (1) Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu (2) Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
	a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A/B/C/D	B	0.67	Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP Dinas Kesehatan yang terdapat 95 (sembilan puluh lima) SOP yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
	a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	A/B/C	A	1.00	Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP Dinas Kesehatan yang terdapat 95 (sembilan puluh lima) SOP yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
	a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan	A/B/C/D	A	1.00	Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan pada Dinas Kesehatan yang terdapat 95 (sembilan puluh lima) SOP yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
	a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A/B/C/D	B	0.67	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti. Dinas Kesehatan terdapat 95 (sembilan puluh lima) SOP yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
	a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	A/B/C	B	0.50	Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi yang dibuktikan dengan adanya Cascading tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
0.50				0.38	
	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya/Tidak	Ya	1.00	Telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik, hal ini ditunjukkan dengan adanya : (1) Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu (2) Instruksi Dinas Kesehatan tentang Peningkatan Komunikasi dalam Upaya Kewaspadaan dan Penanganan Kasus Covid-19 3. SK No. 338/KPTS/IV/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Daerah Di Kabupaten Bengkulu.
	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A/B/C	B	0.50	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala, hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan rapat Tim Satgas Covid yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu
1.40				1.02	
0.20				0.20	
	a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan unit kerja c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A/B/C	A	1.00	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja, hal ini ditunjukkan dengan : (1) Analisis Jabatan dan Beban Kerja (2) peta jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
	a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C	A	1.00	Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu dengan adanya : ANJAB dan ABK DINAS KESEHATAN KAB. BENGKALIS
	a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C/D	A	1.00	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan, hal ini ditunjukkan dengan adanya : (1) Analisis Jabatan dan Beban Kerja (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
0.20				0.13	
	a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C/D	B	0.67	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai dengan adanya : (1) Surat dari sekretaris daerah Nomor : 890/BKPP-PKAI/2022/352 Tahun 2022 tentang permintaan data pejabat yg belum mengikuti PKN Tk.I,PKA dan PKP tahun 2022. (2) surat dari kepala dinas kesehatan nomor : 440/UPT-TM/TU/2022/127 tentang daftar usulan nama pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

	a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C/D	B	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi dengan ditunjukkan : (1) SK tim penguji Uji kompetensi nomor 800/Disk-Skrt/011 tahun 2021 (2) Laporan Uji Kompetensi tahun 2021	
0.40									0.31			
	a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu	A/B/C/D	A	1.00					1.00			Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai, ditunjukkan adanya SKP Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
	a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	1.00					1.00			Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi, ditunjukkan adanya Realisasi SKP Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu tahun 2021
	a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A/B/C/D	A	1.00					1.00			Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya, ditunjukkan dengan adanya SKP Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu tahun 2021 yaitu SKP Eselon II, SKP Eselon III, SKP Eselon IV dan SKP Pelaksana/ Staf.
	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	C	0.50					0.50			Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran, ditunjukkan adanya SKP Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu tahun 2021
	a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu	A/B/C/D/E	C	0.50					0.50			Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran, ditunjukkan adanya SKP Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu tahun 2021.
	a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya	A/B/C/D	B	0.67					0.67			Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya. Reward: PNS yg bisa diajukan kenaikan pangkat jika nilai SKP bernilai Baik. (1) Surat pengantar kenaikan pangkat 2022 nomor : 800/Disk-Skrt/32 tahun 2022 (2) SAMPEL SKP 2020-2021 PNS yg mengajukan kenaikan pangkat
0.20									0.15			
	a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan	A/B/C/D	A	1.00					1.00			Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan dengan adanya : (1) surat edaran dari BKPP Kab. Bengkulu nomor : 800/BKPP-PKPP/748/2020 Tentang pedoman penertan disiplin bagi ASN yg melakukan Kegiatan keluar daerah dsb (2) Peraturan Bupati Bengkulu nomor 80 tahun 2017 Tentang kode etik ASN dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu
	a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	A/B/C	B	0.50					0.50			adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala dengan ditunjukkannya : (1) Surat Teguran tahun 2017 terhadap PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu (2) surat penegakan disiplin PNS dari BKPP Nomor 800/BKPP-PKPP/2022/832 tahun 2022 (3) surat penegakan disiplin salah satu PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu tahun 2022
0.20									0.03			
	a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan d. SKJ belum diimplementasi	A/B/C/D	D	0.00					0.00			SKJ belum diimplementasikan
	a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ d. Evaluasi jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ e. Evaluasi jabatan belum dilaksanakan	A/B/C/D/E	D	0.25					0.25			Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ
0.20									0.20			
	Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya/Tidak	Ya	1.00					1.00			Pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian
2.50									2.50			
1.00									1.00			
	a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Renstra c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Renstra d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A/B/C/D	A	1.00					1.00			Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra, ditunjukkan adanya rapat penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2016-2021 Perubahan
	a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Penetapan Kinerja c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A/B/C/D	A	1.00					1.00			Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh rapat penyusunan Penetapan Kinerja, ditunjukkan adanya rapat penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
	a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara berkala c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A/B/C/D	A	1.00					1.00			Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala sesuai dengan adanya Monev Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu 2016-2021 Perubahan dan Rencana Aksi

	a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada	A/B/C/D	A	1.00	Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah, ditunjukkan adanya Monev Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2016-2021 Perubahan
	a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada	A/B/C/D	A	1.00	Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun, ditunjukkan adanya Monev Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2016-2021 Perubahan
	a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja	A/B/C/D	A	1.00	Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala, ditunjukkan dengan adanya Monev Laporan Capaian Kinerja + Rencana Aksi
1.50				1.50	
	a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	A	1.00	terdapat Bimtek e-LPPD dan e-SPM yang diikuti untuk peningkatan kapasitas SDM dalam menangani akuntabilitas kinerja
	a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A/B/C/D/E	A	1.00	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan, hal ini ditunjukkan dengan adanya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
2.20				1.43	
0.30				0.08	
	a. <i>Public campaign</i> telah dilakukan secara berkala b. <i>Public campaign</i> dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan <i>public campaign</i>	A/B/C	A	1.00	Public Campaign telah dilakukan secara berkala dengan bukti Banner
	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	Ya/Tidak	Tidak	0.00	belum ada unit penanganan gratifikasi
	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Tidak	0.00	tidak ada evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak	Tidak	0.00	Tidak terdapat laporan tindak lanjut
0.30				0.23	
	a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian	A/B/C	A	1.00	Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian
	a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko	A/B/C/D	A	1.00	unit kerja telah menilai seluruh risiko dengan bukti Peta risiko
	a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian d. Risiko belum dikendalikan	A/B/C/D	A	1.00	Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian
	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A/B/C/D	A	1.00	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
	a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A/B/C	B	0.50	Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
	a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI	A/B/C/D	D	0.00	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI
0.50				0.50	
	a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	A/B/C/D	A	1.00	Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti di aplikasi SPAN LAPOR
	a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	1.00	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala, dibuktikan dengan adanya aplikasi SP4NLAPOR!
	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya/Tidak	Ya	1.00	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
0.30				0.30	
	a. <i>Whistle blowing system</i> disosialisasikan ke seluruh pegawai b. <i>Whistle blowing system</i> disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. <i>Whistle blowing system</i> disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. <i>Whistle blowing system</i> belum disosialisasikan	A/B/C/D	A	1.00	Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai dengan bukti cara penggunaan aplikasi SPAN
0.30				0.08	
	a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan	A/B/C/D	A	1.00	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh pegawai dengan bukti screenshot JDIH tentang penanganan benturan kepentingan

	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya/Tidak	Tidak	0.00	Penanganan benturan kepentingan belum diimplementasikan
	a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	C	0.00	Penanganan benturan kepentingan belum di monitoring dan evaluasi
	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan	A/B/C/D	D	0.00	Belum ada tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan
0.50				0.25	
	Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas	Ya/Tidak	Ya	1.00	Terdapat dokumen penandatanganan pakta integritas, hal ini ditunjukkan dengan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 255/KPTS/V/2015 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
	a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A/B/C	B	0.50	Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif
	a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi	A/B/C	C	0.00	Pembangunan zona integritas belum dimonitoring dan evaluasi
2.50				1.79	
0.40				0.31	
	a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	A	1.00	Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku yang tertuang dalam laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	C	0.33	Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan
	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	A/B/C/D	A	1.00	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat, serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, dengan dilaksanakannya lokal karya mini lintas sektor triwulan.
0.40				0.20	
	a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D	A	1.00	Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan, antara lain adanya kelas ibu hamil di Desa-Desa Kecamatan Bantan
	a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website /media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website /media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses	A/B/C/D	A	1.00	Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional, dapat dilihat dari salah satu sosial media puskesmas selatbaru yaitu facebook, instagram,dll
	a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A/B/C/D	D	0.00	Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
	a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	D	0.00	Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
	a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu, namun sarana prasarana layanan belum memenuhi standar sarpras d. Apabila pelayanan belum terpadu	A/B/C/D	B	0.67	Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras, dengan adanya koordinasi lintas sektor dengan Dinas Sosial, Disdukcapil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan BPJS terkait Kolaborasi Program JKN

	a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain d. Belum terdapat inovasi pelayanan	A/B/C/D	C	0.33	Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain, dapat dilihat pada petunjuk Teknis dan SK data dukung Pelayanan Kesehatan
0.60				0.38	
	a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	C	0.50	Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani
	a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja	A/B/C/D	D	0.00	Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja
	a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan	A/B/C/D	A	1.00	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan Pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan, dengan dilaksanakannya rapat tinjauan manajemen minimal 1 tahun satu kali di Puskesmas.
	a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A/B/C	A	1.00	Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala : (1) dengan dilakukannya lokal karya mini lintas sector.
0.70				0.70	
	a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C/D/E	A	1.00	Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, dibuktikan dengan hasil penyampaian survei kepuasan masyarakat tahun 2021
	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara <i>online</i> ( <i>website</i> , media sosial, dll) dan <i>offline</i> b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara <i>offline</i> di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	A	1.00	Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan, dapat dilihat dalam arsip Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	1.00	Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat : (1) Terdapat hasil survei yang ditujukan kepada yth Sekretaris Daerah, Cq. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
0.40				0.20	
	a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	A	1.00	Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan, adanya Aplikasi Mobile JKN yang bisa diakses dengan mudah untuk dipahami
	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	C	0.00	Belum dilakukan perbaikan
21.70				13.75	
3.00				2.67	
1.50				1.50	
	1 Agen 1 Perubahan	%	100.00%	1.00	
		Jumlah	1.00		Dibuktikan adanya : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Nomor : 800 / Diskes-SKRT/ 05 tentang Pembentukan Agent Of Change Reformasi Birokrasi pada tanggal 3 Januari 2022.
		Jumlah	1.00		Dibuktikan adanya : Dashboard Pemantauan Kasus Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
	Perubahan/Inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan	%	100.00%	1.00	
		Jumlah	1.00		Dibuktikan adanya : Dashboard Pemantauan Kasus Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
		Jumlah	1.00		Dibuktikan adanya : Dashboard Pemantauan Kasus Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
1.00				1.00	
	a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen perencanaan unit kerja	A/B/C/D/E	A	1.00	Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai dengan adanya : Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
0.50				0.17	
	a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A/B/C/D	C	0.33	Belum menyusun budaya kerja dan nilai - nilai organisasi



2.00				1.00
2.00				1.00
	a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya c. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan lainnya	A/B/C	B	0.50
	Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit	%	50.00%	0.50
		Jumlah	2.00	
		Jumlah	1.00	
1.50				0.75
1.50				0.75
	a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan c. Belum ada usulan	A/B/C	B	0.50
3.75				0.79
0.50				0.17
	a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan	A/B/C/D	C	0.33
1.25				0.63
	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	B	0.50
	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	B	0.50
2.00				0.00
	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	E	0.00
	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	E	0.00
	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	E	0.00
2.00				1.75
1.00				1.00

	Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya
	ada Dua kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja
	ada Satu kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja
	sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses bisnis/ kinerja utaa yang dihasilkan
	Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan hal ini ditujukan dengan penyederhanaan peta jabatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
	Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) hal ini dapat ditunjukkan pada : (1) Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tentang Petugas Call Center (2) Penggunaan Website Dinas Kesehatan, Media Sosial Dinas Kesehatan, dan Dashboard Covid sebagai pelaksanaan pelayanan publik.
	Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) hal ini ditujukan dengan kemudahan akses data bagi publik pada Media Sosial dan SK Bupati Bengkalis No. 571/KPTS/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Komunikasi Data Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Bengkalis Tahun 2021
	Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan
	Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan
	Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan dan ditetapkan

	a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)	A/B/C	A	1.00	Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya yang ditunjukkan dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja kepala dinas kesehatan-sekretaris dinas kesehatan-kasubbag kepegawaian-pelaksana
0.50				0.25	
	a. Seluruh hasil <i>assessment</i> dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil <i>assessment</i> belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil <i>assessment</i> belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C	B	0.50	Hasil assesment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya : pelaksanaan uji kompetensi kesehatan.
0.50				0.50	
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	%	100.00%	1.00	
		Jumlah	2.00		Pelanggaran disiplin tahun 2020 ada 2. ditunjukkan dengan adanya (1)
		Jumlah	0.00		Pelanggaran disiplin tahun 2021 tidak ada pelanggaran disiplin PNS
		Jumlah	2.00		Jumlah pelanggaran disiplin PNS yang telah diberikan sanksi/hukuman ada 2
3.75				1.50	
1.00				1.00	
		Jumlah	5.00		Terdapat 5 (Lima) program yang tertuang dalam DPA
		Jumlah	2.00		Terdapat 18 kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam DPA
	Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau lebih				
		Jumlah	2.00		Terdapat 2 program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi yang tertuang dalam IKU
		Jumlah	2.00		Terdapat 2 Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi yang tertuang dalam IKU
	Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	%	100.00%	1.00	
		Jumlah	2.00		Terdapat 2 Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi yang tertuang dalam IKU
		Jumlah	2.00		Terdapat 2 kegiatan yang Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran Kinerja tercapai 100% atau lebih Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing dibagi dengan Jumlah Anggaran Total	%	97.73%	0.98	
		Rupiah	59,057,467,751		
		Rupiah	57,718,748,343		Jumlah total anggaran Kinerja Sasaran selama tahun 2021 adalah Jumlah anggaran yang berhasil di recotusing sehingga anggaran menjadi total 57,718,748,343 sesuai yang tertuang dalam DPA Dinas Kesehatan
1.00				0.00	
	a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi penganggaran b. Aplikais yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi penganggaran c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah dimanfaatkan untuk monitoring kinerja d. Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaatan monitoring kinerja	A/B/C/D	D	0.00	Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaatan monitoring kinerja
1.00				0.00	
	a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> ; b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> ; c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> ; d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> .	A/B/C/D	D	0.00	Capaian kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment
0.75				0.50	
	a. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; b. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; d. Peta strategis (Kerangka Logis) belum ada.	A/B/C/D	B	0.67	Peta Strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai yang ditunjukkan dengan Cascading Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
1.95				1.95	
0.75				0.75	
	Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005	%	100.00%	1.00	
		Jumlah	6.00		
		Jumlah	1.00		Jumlah eselon II hanya 1 (satu) orang yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
		Jumlah	5.00		Jumlah lainnya yang harus melapor LHKPN 5 (lima) orang terdiri dari Pejabat Administrator eselon III
		Jumlah	6.00		Persentase Penyampaian LHKPN Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan REKAPITULASI JUMLAH PENYELENGGARA NEGARA WAJIB LAPOR SUDAH MELAPORKAN LHKPN TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
0.60				0.60	
	Penyampaian LHKASN diatur dalam:	%	100.00%	1.00	

		Jumlah	0.00	
		Jumlah	5.00	
		Jumlah	15.00	
		Jumlah	42.00	
		Jumlah	62.00	
0.60				0.60
	Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	%	100.00%	1.00
		Jumlah	1.00	
		Jumlah	1.00	
		Jumlah	1.00	
3.75				3.34
2.50				2.09
	a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi	A/B/C/D	B	0.67
	Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	%	100.00%	1.00
		Jumlah	34.00	
		Jumlah	34.00	
1.25				1.25
	a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas	A/B/C/D	A	1.00

Jumlah eselon III pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sejumlah 5 (lima) orang
Jumlah Eselon IV pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sejumlah 15 orang
Jumlah fungsional dan pelaksana 42 orang
Jumlah yang sudah melaporkan SPT Tahunan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sejumlah 62 orang dianggap sudah melaporkan LHKASN
Adanya pengaduan masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis melalui
Adanya pengaduan masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis melalui
Berdasarkan daftar monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat tahun 2021, tidak terdapat adanya
Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah), adanya beberapa inovasi yang dilaksanakan di puskesmas selatbaru
Pelayanan perizinan hanya pemberian rekomendasi untuk selanjutnya di tindaklanjuti pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan perizinan hanya pemberian rekomendasi untuk selanjutnya di tindaklanjuti pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media, dengan terbitnya Surat Rekom dari Dinas Kesehatan untuk pengobatan pasien.